BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik.

2.1.1 Perancangan

Definisi Perancangan dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* adalah sebagai berikut: "perancangan adalah kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecahan masalah." (Susanto Azhar, 2013:48)

Definisi perancangan:

> "Perancangan mencakup perancangan logis dan fisik. Kegiatan pokok perancangan logis adalah melengkapi *ekternal level schema* dan menterjemahkan persyaratan data para pemakai dan program aplikasi ke dalam *conceptual level schema*. Perancangan Fisik (*Physical Design*) adalah mengubah hasil rancangan konsep ke dalam struktur penyimpanan fisik". (Krismiaji, 2010:144):

Berdasarkan definisi-definisi di atas yang berdasarkan dari berbagai buku penulis dapat menyimpulkan perancangan merupakan alternatif pemecahan masalah secara logis dan fisik.

2.1.2 Sistem

Definisi sistem dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, menjelaskan bahwa "Sistem adalah kumpulan dari sub sistem bagian komponen apapun baik phisik ataupun nonpisik yang saling berhubungan satu sama lain dan

bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu".(Susanto Azhar, 2009:18)

Definisi lain sistem dalam buku yang berjudul sistem informasi akuntansi adalah "kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu."(Puspitawati Lilis, 2011:2)

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen baik phisik mupun nonphisik yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Informasi

Definisi Informasi dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi , informasi adalah "data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya."(Puspitawati Lilis, 2011:13)

Definisi Informasi dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Teknologi adalah "informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya."(Mustahik, 2009:36)

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerima dan pemakainya.

2.1.4 Sistem Informasi

Definisi sistem informasi menurut Robert A.Leitch dan K.Ros Davis yang dikutip dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut:

> “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”.(Puspitawati Lilis dan Sri Dewi Anggadini, 2011:14)

Definisi sistem informasi “Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik yang saling berhubunga satu sama dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna”. (Susanto Azhar, 2013:52)

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan sistem informasi adalah suatu sistem yang saling berhubungan secara harmonis yang mengolah data menjadi laporan-laporan yang berguna bagi penggunanya.

2.1.5 Akuntansi

Definisi akuntansi dalam buku yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* menjelaskan bahwa:

> “Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternative arah tindakan. Akuntansi terdiri atas beberapa cabang, di antaranya akuntansi keuangan manajemen dan pemerintah”.(Halim Abdul, 2007:250)

Definisi lain akuntansi dalam buku yang berjudul Akuntansi Pemerintah bahwa “Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan”.(Nordiawan Dedi dan dkk, 2008:1)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka mengenali, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonommi dalam pembuatan pilihan-pilihan nalar diantara beberapa alternatif tindakan.

2.1.5.1 Metode Pencatatan Akuntansi

Definisi Metode Pencatatan Akuntansi dalam buku yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* menjelaskan bahwa:

> "*Accrual Basic* atau dasar akrual adalah menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. *Cash Basic* adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)".(Halim Abdul, 2007:49)

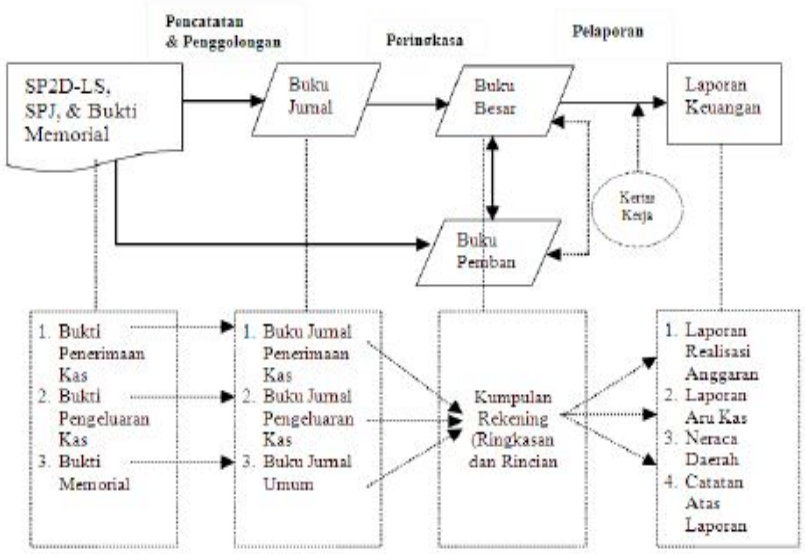
Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam akuntansi ada dua pencatatan yaitu *Acrual Basic.*

2.1.5.2 Proses Akuntansi

Definsi Proses Akuntansi dalam buku yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* menjelaskan bahwa:

> "Menurut Kepmendagri No 29 Tahun 2009 adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan Sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum".

Berikut ini gambaran proses akuntansi akan tampak seperti di bawah ini:



Gambar 2.1 Proses Akuntansi .(2007:52)

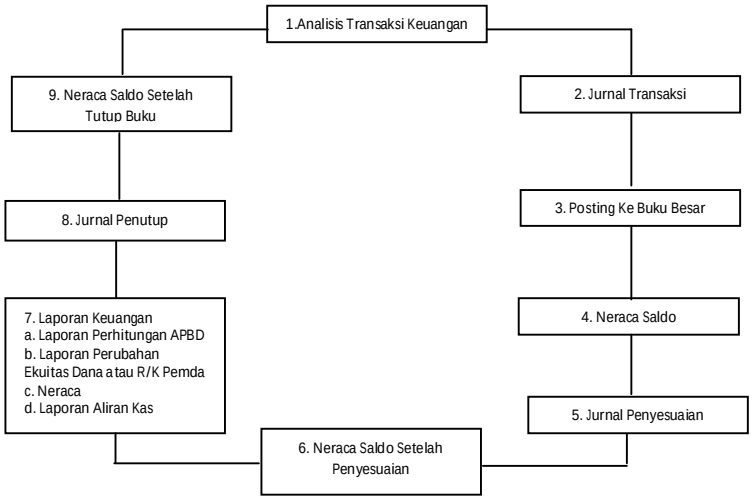
Berdasarkan definisi di atas penulis dapat mengambil simpulan bahwa proses akuntansi dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan srta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD.

2.1.5.3 Siklus Akuntansi

Deffinisi Siklus Akuntansi dalam buku yang berjudul *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* menjelaskan bahwaa; “Siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi.”(Nunuy, 2009:7)

Definisi lain siklus akuntansi dalam buku yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* menjelaskan bahwa: "Siklus akuntansi adalah suatu sistem untuk mengolah input (masukan) menjadi *output* (pengeluaran)."(Halim Abdul, 2007:52)

Siklus Akuntansi apabila digambarkan akan tampak seperti di bawah ini:



Gambar 2.2 Silkus Akuntansi (Halim Abdul, 2007:54)

Berdasarkan definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan akuntansi mulai dari mengolah *input* sampai dengan menjadi *output*.

2.1.5.3.1 Jurnal Umum

Definisi jurnal umum dalam buku yang berjudul Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa: "Menjurnal adalah prosedur

mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal adalah media untuk mencatatat transaksi secara kronologis."(Nunuy, 2009:10)

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jurnal adalah catataan akutansi pertama yang dicatat dibuku jurnal.

Tabel 2.1 Jurnal Umum (PMK No 264/PMK.05/2014)
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JURNAL UMUM
PERIODE, XXX

Tanggal	**Kode Rekening**	**Uraian**	**Jumlah**	
			Debit	**Kredit**
xxx	xxx	Xxx	xxx	0
xxx	xxx	xxx	0	xxx

Tabel 2.2 Jurnal Umum Mencatat Transaksi Pendapatan dan Pengeluaran
(Nunuy,2009:10)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JURNAL UMUM
PERIODE,XXX

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah	
				Debit	Kredit
xxx	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx	xxx	
	4.3.5.01.01	Penerimaan Dana	xx		xxx
	5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.2.07	Belanja sewa rumah/Gedung/Parkiran	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pembina	xx	xxx	
	1.1.1.01.01	Kas Bendahara	xx		xxx
	5.2.1.02.02	Honorarium/Uang Saku	xx	xxx	
	1.1.1.01.02	Kas Bank	xx		xxx

2.1.5.3.2 Buku Besar

Definisi buku besar dalam buku yang berjudul Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “Buku besar umum adalah

sebuah buku yang berisi kumpulan rekening/perkiraan/akun (account).”(Halim Abdul, 2007:67)

Definisi lain buku besar dalam buku yang berjudul Implementasi Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa: “Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (*accoun*t).”(Nunuy, 2009:10)

Berdasarkan definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa buku besar umum adalah buku yang mencatat perkiraan akutansi setelah diklasifikasikan.

Tabel 2.3 Buku Besar Umum (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : xxx Unit Organisasi : xxx Kode Rekening : xxx Halaman : xxx					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
xxx	Xxx	xx	xxx	xxx	xxx
xxx	Xxx	xx	xxx	xxx	xxx
xxx	Xxx	xx	xxx	xxx	xxx
xxx	Xxx	xx	xxx	xxx	xxx
Xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx

Tabel 2.6 Buku Besar Umum Untuk Kas Bank
(Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Kas Bank Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 1.1.1.01.02 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
xxx	Honorarium uang saku	xx		xxx	K

Tabel 2.4 Buku Besar Umum Untuk Kas Bendahara (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU BESAR

PERIODE,XXX

Nama Akun :

Unit Organisasi :

Kode Rekening :

Halaman :

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
Xxx	Penerimaan Dana		xxx		D
	Honorarium Non PNS			xxx	K
	Honorarium Pegawai Honorer			xxx	K
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			xxx	K
	Honorarium PNS			xxx	K
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			xxx	K
	Belanja Perjalanan Dinas			xxx	K
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			xxx	K
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			xxx	K
	Uang Lembur			xxx	K
	Uang Lembur PNS			xxx	K
	Uang Lembur Non PNS			xxx	K
	Belanja sewa rumah/Gedung/Parkiran			xxx	K
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			xxx	K
	Honorarium Tim Pembina			xxx	K

Tabel 2.6 Buku Besar Umum Untuk Honorarium Non PNS (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BUKU BESAR

PERIODE,XXX

Nama Akun : Honorarium Non PNS

Unit Organisasi : 1 . 21 . 01

Kode Rekening : 5.2.1.02

Halaman : 1

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo
xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.6 Buku Besar Umum Untuk Honorarium Pegawai Honorer (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Honorarium Pegawai Honorer Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.02.01 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.7 Buku Besar Umum Untuk Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.2.20.03 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.8 Buku Besar Umum Untuk Honorarium PNS (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Untuk Honorarium PNS Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.01 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.9 Buku Besar Umum Untuk Honorarium PNS (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Untuk Honorarium PNS Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.01 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.10 Buku Besar Umum Untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.01.02 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.11 Buku Besar Umum Untuk Belanja Perjalanan Dinas (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Belanja Perjalanan Dinas Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.2.15 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.12 Buku Besar Umum Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Perjalanan Dinas Luar Daerah Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.2.15.02 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.13 Buku Besar Umum Untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.2.15.01 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.14 Buku Besar Umum Untuk Uang Lembur (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Uang Lembur Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.03 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.15 Buku Besar Umum Untuk Uang Lembur Non PNS (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Uang Lembur Non PNS Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.03.02 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.16 Buku Besar Umum Untuk Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkiran (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkiran Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.2.07 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.17 Buku Besar Umum Untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.2.07.03 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
Xxx	Kas	xx		xxx	K

Tabel 2.18 Buku Besar Umum Untuk Honorarium Tim Pembina (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Honorarium Tim Pembina Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.01.03 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
xxx	Kas	xx		Xxx	K

Tabel 2.19 Buku Besar Umum Untuk Honorarium/Uang Saku (Nunuy, 2009:11)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BUKU BESAR PERIODE,XXX					
Nama Akun : Honorarium/Uang Saku Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 Kode Rekening : 5.2.1.02.02 Halaman : 1					
Tanggal	**Keterangan**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**	**Saldo**
xxx	Kas	xx		Xxx	K

2.1.5.3.3 Neraca Saldo

Definisi buku besar umum menurut Supriyati (2011:54)"neraca saldo adalah suatu laporan yang membuat tentang saldo-saldo akun, baik itu akun saldo debit maupun akun yang bersaldo kredit.". Definisi lain dari buku besar menurut Soemarso (2009:110) "daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu".

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa neraca saldo adalah laporan yang membuat saldo debit dan kredit dalam buku besar para periode tertentu.

2.1.5 Sistem Akuntansi

Definisi sistem informasi akuntansi:

> "Sistem Informsi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, memproses, menganalisis, mengkomunikasikan informasi pengambilan keputusan dengan orientasi financial yang relevan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam perusahaan (secara prinsip adalah manajemen)." (Jogiyanto, 2005:17)

Definisi lain Sistem Informasi:

> "Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang salig berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam pross pengambilan keputusan di budang keuangan."(Susanto Azhar, 2004:124)

Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli mak penulis dapat menyimpulkan bahwasistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari beberapa subsistem yang saling brkaitan untuk pengambilan keputusan keuangan.

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi

Definisi sistem informasi akuntansi:

> "Sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisir formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keungan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimppinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan."(Puspitawati Lilis dan Sri Dewi Angga Dini, 2013:37)

Definisi sistem informasi akuntansi:

> "Kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan." (Azhar Susanto, 2013:72)

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang saling berhubungan untuk mengoorganisir formulir, catatan dan laporan untuk menghasilkan informasi keuangan.

2.1.8 Belanja

2.1.8.1 Definisi Belanja Daerah

Definisi Belanja Daerah dalam buku yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Kuangan Daerah" adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.(Halim Abdul, 2002:68)

Definisi lain belanja daerah dalam buku yang berjudul "Sistem Akuntansi Sektor Publik" adalah penurunan aktiva/kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu."(Bastian Indra 2003:53)

Berdasarkan definisi menurut para ahli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa belanja adalah pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

2.1.7.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Dalam buku yang berjudul "Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah" secara umum Belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelompok, yaitu :

1. Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas/pelayanan publik.

2. Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana publik terdiri atas:

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. Belanja Pegawai ini terdiri atas:

1). Honorarium, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran honor personal/orang yang secara langsung melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya, Honor Bulanan, Honor Harian, dan Honor Proyek.

2). Upah Lembur, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai karena bekerja diluar jam kerja.

3). Upah, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai harian, yang meliputi upah harian tetap, dan upah harian lepas.

4). Uang Paket, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk anggota dan pimpinan dewan pada kegiatan sidang dewan.

5). Insentif, yaitu pengeluaran guna pemberian uang perangsang atau insentif orang/personal yang bekerja untuk suatu kegiatan.

B. Belanja Barang

Belanja Barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja Barang ini terdiri atas:

1). Biaya Sewa, yaitu pengeluaran untuk sewa tempat guna pelaksanaan suatu aktivitas. Contohnya, Biaya Sewa Gedung, Biaya Sewa Pelabuhan, dan Biaya Sewa Tempat Pelelangan dan Penjualan.

2). Biaya Bahan Percontohan, yang meliputi hewan dan tanaman.

C. Belanja Perjalanan

Belanja Perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Biaya ini antara lain meliputi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.

D. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja Operasional meliputi:

1). Belanja Pemeliharaan Gedung Pelayanan Umum. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Gedung Olah Raga, Biaya Pemeliharaan Wisma, dan Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit.

2). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Jembatan Timbang, Biaya Pemeliharaan Jalan Daerah Provinsi, dan Biaya Pemeliharaan Jembatan.

3). Belanja Pemeliharaan Kendaraan. Contohnya, Biaya Pengujian Kendaraan, Biaya Reparasi dan Penggantian Suku Cadang, dan Biaya Pembelian Ban.

4). Belanja Pemeliharaan Peralatan Operasional. Contonhnya, Biaya Pemeliharaan Bengkel, Biaya Pemeliharaan Peralatan Pertanian, dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kesehatan.

5). Belanja Pemeliharaan Mesin. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Mesin Cetak, Biaya Pemeliharaan Mesin Pengeboran Tanah, dan Biaya Pemeliharaan Mesin Pabrik.

6). Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Operasional. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kesehatan, Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Pendidikan, dan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Pertanian.

7). Belanja Pemeliharaan Sungai dan Saluran.

8). Belanja Pemeliharaan Museum. Contohnya, Biaya Pemeliharaan Museum Perjuangan, Biaya Pemeliharaan Museum Peninggalan Purbakala, dan Biaya Pemeliharaan Museum Budaya.

9). Belanja Pemeliharaan Terminal. Biaya Pemeliharaan Terminal Bus/Truk, Biaya Pemeliharaan Terminal Peti Kemas, dan Biaya Pemeliharaan Terminal Laut.

10). Belanja Pemeliharaan Kebun dan Ternak. Contohnya Biaya Pemeliharaan Kebun, Biaya Pemeliharaan Ternak, Biaya Pemeliharaan Kolam.

11). Belanja Pemeliharaan Taman. Contohnya Biaya Pemeliharaan Taman Rekreasi.

12). Belanja Pemeliharaan *Emplacement*. Contohnya Biaya Pemeliharaan *Emplacement* Rumah Sakit, dan Biaya Pemeliharaan *Emplacement* Bangunan.

13). Belanja Pegawai

14). Belanja Barang

E. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengambilan imbalan maupun keuntungan dari penagihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas:

1) Angsuran Pinjaman
2) Dana Bantuan
3) Dana Cadangan

F. Belanja Tak Tersangka

Belanja Tak Tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang tidak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

F. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah *asset* atau kekayaan daerah

yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti Biaya Operasi dan Pemeliharaan. (Halim Abdul, 2002:68)

2.1.9 Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

2.1.9.1 Standar Akuntansi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 264/PMK.05/2014**.** Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam:

A. Pendapatan-LO
B. Beban dan
C. Surplus / defisit operasional.

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasio nal dan pos luar biasa yang merupakan tran saksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

2.1.9.1.1 Metode Pencatatan Akuntansi

A. *Single Entry*

1. *Single Entry* adalah sistem tata buku tunggal
2. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali.
    i. Pertambahan kas dicatat sisi penerimaaan
    ii. Pengurangan kas dicatat sisi pengeluaran

B. *Double Entry*

1. Transaksi dicatat dua kali
2. Transaksi dicatat dalam jurnal

C. Triple Entry

Double Entry ditambah Pencatatan dalam buku anggaran.

Metode pencatatan yang digunakan adalah *double entry* karena pada saat transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit.

2.1.9.1.2 Silkus Akuntansi

A. Laporan Keuangan

Siklus Akuntansi dalam buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: “Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah menyusun neraca saldo, setelah penyesuaian disusunlah laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian.” (Abdul Halim, 2007:73)

Berdasarkan definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian.

B. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

1. Surplus/Defisit

Definisi Surplus/Defisit dalam buku yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Auntansi Keuangan Daerah* menjelaskan bahwa: “Surplus Defisit adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.” (Halim Abdul, 2007:108)

Definisi lain surplus/deficit dalam buku yang berjudul *Sistem Akuntansi Sektor Publik* menjelaskan bahwa: “Laporan surplus/defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (Pemerintah Daerah) dalam satu periode akuntansi.” (Bastian Indra, 2006:379)

Berdasarkan definisi di atas makan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa surplus/deficit adalah selisih lebih atau kurang yang menggambarkan kinerja suatu entitas (Pemerintah Daerah) selama satu periode pelaporan.

Tabel 2.20 Laporan Surplus/Defisit (PMK No 264/PMK.05/2014)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT LAPORAN SURPLUS/DEFISIT PERIODE,XXX			
No.Rek	**Keterangan**	**Jumlah**	
	A. PENDAPATAN		xxx
4.3.5.01.01	Penerimaan Dana		xxx
	Jumlah		
	B. PENGELUARAN		
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	xxx	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer	xxx	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	xxx	
5.2.1.01	Honorarium PNS	xxx	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	xxx	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	xxx	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	xxx	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	xxx	
5.2.1.03	Uang Lembur	xxx	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	xxx	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	xxx	
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/Gedung/Parkiran	xxx	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	xxx	
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pembina	xxx	
5.2.1.02.02	Honorarium/Uang Saku	xxx	
	JUMLAH		(xxx)
	SURPLUS/DEFISIT		xxx

2. Laporan Belanja Oprasional

Tabel 2.21 Laporan Belanja Oprasional

(PMK No 264/PMK.05/2014)

LAPORAN OPRASIONAL

PEMERINTAHKABUPATEN BANDUNG BARAT

PERIODE,XXX

Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/Penurunan
KEGIATAN OPRASIONAL PENDAPATAN			
PENDAPATAN			
Penerimaan Dana	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xxx
BEBAN			
Honorarium Pegawai Honorer	xxx	xxx	xxx
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	xxx	xxx	xxx
Honorarium PNS	xxx	xxx	xxx
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx
Belanja Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	xxx	xxx	xxx
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	xxx	xxx	xxx
Uang Lembur PNS	xxx	xxx	xxx
Uang Lembur Non PNS	xxx	xxx	xxx
Belanja sewa rumah/Gedung/Parkiran	xxx	xxx	xxx
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	xxx	xxx	xxx
Honorarium Tim Pembina	xxx	xxx	xxx
Honorarium/Uang Saku	xxx	xxx	xxx
Jumlah Beban	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx

2.1.10 Sistem Informasi Akuntansi Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Menurut penulis defnisi dari sistem informasi akuntansi belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik adalah sistem sistem yang bekerja dipadukan proses dan siklus akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan anggaran belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik.

2.1.11 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Dari pengertian-pengertian diatas penulis menyimpulkan definisi dari perancangan sistem informasi akuntansi belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik adalah suatu kegiatan untuk mendesain sistem yang bekerja dipadukan proses dan siklus akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan anggaran belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik.

2.1.11.1 Fungsi Yang Terkait

Dalam buku yang berjudul *Sistem Akuntansi* menerangkan bahwa fungsi yang terkait dalam buku *Sistem Informasi Akuntansi* Anggaran antara lain sebagai berikut :

A. Fungsi Kas

Dalam sistem akuntansi anggaran fungsi ini bertanggung jawab atas pembayaran.

B. Fungsi akuntansi

Bertugas mencatat anggran yang menyangkut biaya, mencatat transaksi anggran belanja dalam jurnal anggran, membuat bukti kas masuk dan keluar yang meberikan otorisasi kepada fungsi kas yang mengeluarkan otorisasi."

C. Fungsi yang digunakan dalam pengeluaran

Mengajukan permintaan untuk pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi. (Mulyadi, 2006:312)

2.1.11.2 Formulir/Dokumen Yang Digunakan

Dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,* menjelaskan formulir yang digunakan dalam akuntansi pemerintah adalah:

"A. Pada Akuntansi Penerimaan Kas

3. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak.
4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRB), digunakan untuk menetapkan restribusi daerah atas wajib restribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
5. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.
6. Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarankan oleh bedahara penerimaan pada SKPD.
7. Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti transfer penerimaan daerah.
8. Nota Kredit Bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukan adanya transfer uang masuk ke rekening kas.

B. Pada Akuntansi Pengeluaran Kas

1. Surat Penyediaan Dana (SPD), merupaka dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
2. Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuasa BUD.
3. Kuitansi pembayara dan bukti pembayarn lainnya, merupakan dokumen sebagai bukti pembayaran.
4. SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjukan.
5. Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
6. Nota debit bank, merupakan dokumen atas bukti dari bank yang menunjukan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah."(Halim Abdul, 2007:78)

2.1.11.3 Catatan Yang Digunakan

Dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,* menjelaskan catatan yang digunakan dalam akuntansi pemerintah adalah:

"A Pada Akuntansi Penerimaan Kas

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat atau menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas.
2. Buku Besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memosting semua transaksi.
3. Buku Besar Pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

B. Pada Akuntansi Pengeluaran Kas

1. Buku Jurnal Pengeluaran Kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat atau menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas
2. Buku Besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memosting semua transaksi.
3. Buku Besar Pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu."(Halim Abdul, 2007:79)

2.1.11.4 Kebutuhan Rekayasa *Software* SIA Keuangan Daerah

Dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen*, menjelaskan bahwa: ”*Software* adalah kumpulan dari program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer.”(Susanto Azhar, 2004:166)

Kebutuhan *software* dalam Sistem Informasi Auntansi Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

A. Sistem Operasi (*Oprating System*)

Sitem Operasi (*Oprating System*) terdiri berbagai macam jenis dan diantaranya seperti Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Ubuntu ataupun Bulnex.

Berdasarkan sistem operasi (*operating system)* di atas, kebutuhan software Sistem Informasi Akuntansi Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik yang sesuai dengan perusahaan yang diteliti yaitu dengan meggunakan sistem operasi (*operating system)* windows XP, karena windows XP mensuport aplikasi apapun yang dibutuhkan.

B. Bahasa Pemograman *(Progrming Languanges)*

Bahasa pemograman *(Progrming Languanges)* terdiri dari berbagai macam jenisnya diantaranya adalah: Bahasa C, C++, Delphi, Visual Basic 2008.

Bahasa pemograman *(Progrming Languanges)* yang dibutuhkan dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik adalah dengan menggunkan Microsoft Visual Basic 2008, karena memudahkan berbagai macam *database*, membuat laporan lebih mudah .

C. *Database*

Database terdiri dari berbagai macam jenisnya diantaranya adalah: Oracle, SQL Server, MS Acces, My SQL, dll.

Database yang mendukung program sistem informasi akuntansi ralisasi anggaran adalah My SQL , merupakan *database* yang akan digunakan penulis dalam Merancang Sistem Informasi Akuntansi Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik, karena mampu membuat suatu *dasabase* yang dibutuhkan dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik.

2.2 Bentuk, Jenis dan Bidang Perusahaan

2.2.1 Bentuk

Bentuk perusahaan tempat penulis melakukan penelitian adalah PEMDA (Peemerintah Daerah) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

> "PEMDA (Pemerintah Daerah) adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Berdasarkan definisi di atas pemerintahan daerah penulis menyimpulkan bahwa urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

2.2.2 Jenis Usaha

Jenis perusahaan tempat penulis penelitian adalah jenis jasa. Definisi jasa adalah "perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan jasa (tidak berbentuk fisik) untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan utama perusahaan jasa berasal dari (*Service*)". (Supriyati, 2013:25)

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan definisi jasa adalah perusahaan yang memberikan jasa dengan mendapatkan pendapatan nya dari jasa tersebut.

2.2.3 Bidang Usaha

Bidang perusahaan tempat penulis melakukan aktifitas penelitian adalah bidang pelayanan ketahanan pangan masyarakat.

2.3 Rekayasa Perangkat Lunak

2.3.1 Alat Pengembangan Sistem

2.3.1.1 Diagram Konteks

Definisi diagram konteks dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* menjelaskan bahwa "jenjang tertinggi disebut diagram konteks yang menggambarkan ikhtisar paling ringkas dari sebuah sistem". (Krismiaji, 2010:69)

Definisi diagram konteks dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menjelaskan bahwa: "Diagram Konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses yang menggambarkan ruang lingkup suatu proses." (Al-Bahra, 2005:56)

Berdasarkan definisi-defiisi menurut para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan alur ruang lingkup dari suatu sistem.

2.3.1.2 Diagram Arus Data (*Data Flow Diagram*/DFD)

Pengertian *data flow diagram* dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah "diagram aliran data merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil."(Jadmudin Al-Bahra,bin, 2005:64)

Pengertian *data flow diagram* adalah "Data flow diagram adalah alat yang digunakan untuk membuat model proses (*proses modeling*)."(Susanto Azhar, 2004:147)

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *data flow diagram* (DFD) adalah alat yang menggambarkan model suatu proses.

2.3.1.3 Kamus Data

Definisi kamus data dalam buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menjelaskan bahwa: "Kamus Data adalah catalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi (Jogiyanto, 2004:74)

Definisi lain kamus data dalm buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi,* menjelaskan bahwa: "kamus data sering disebut juga dengan sistem data dictionary adalah catalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi".(Al-Bahra, 2005:70)

Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kamus data adalah keterangan dari pembuatan model sistem DFD *(Data Flow Diagram).*

Isi kamus data menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin dalam bukunya yang berjudul *Analisis & Desain Sistem Informasi*, yaitu:

"a. Nama Arus Data
b. Alias
c. Bentuk Data
d. Arus Data
e. Penjelasan".(Al-Bahra:2005:71)

2.3.1.4 Bagan Alir

Definisi bagan alir atau *flowchart* dalam buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* adalah "*flowchart* adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah."(Jadmudin bin,Al-Bahra, 2005:256)

Definisi bagan alir dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa "bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis". (Krismiaji, 2010:71)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir adalah model sistem berupa bagan yang menjelaskan alur atau arus data pada program yang dibuat

A Bagan Alir Dokumen

Definisi bagan alir dokumen dalam buku yang berjudul *Analisis dan Sistem Informasi* adalah sebagai berikut:

> “Bagan Alir dokumen *(document flowchart)* atau disebut juga” Bagan alir dokumen (*document flowchart)* atau disebut juga bagan alir formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya”(Jogiyanto, 2005:800).

Definisi bagan alir dalam buku yang berjudul *Sisem Informasi Akuntansi* adalah sebagai berikut:

> “Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban sebuah organisasi. Bagan alir ini menelusuri sebuah dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya. Tujuan digunakan dokumen tersebut, kapan tidak dipakai lagi dan hal –hal lain yang terjadi ketika dokumen tersebut mengalir melalui sebuah sistem.”(Krismiaji, 2005:75)

Berdasarkan definisi-definisi di atas yang diambil dari beberapa buku menurut para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir dokumen merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan menjelaskan aliran dokumen dan juga informasi.

B. Bagan Alir Sistem

Definisi bagan alir Sistem Jogiyanto dalam buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* adalah sebagai berikut “bagan alir sistem (*system flowchart*) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem”(2005:75).

Definisi bagan alir menurut Krismiaji dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

> “Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini dimulai dengan identifikasi input yang masuk ke dalam sistem dan sumbernya. Bagan

alir sistem merupakan salah satu alat penting untuk menganalisa, mendesain dan mengevaluasi sebuah sistem"(2005:75).

Berdasarkan definisi-definisi di atas yang diambil dari beberapa buku menurut para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir sistem adalah bagan yang menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan dan output sebuah sisem dan juga menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sebuah sistem.

2.3.1.5 Normalisasi

Menurut Al-Bahra dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menjelaskan bahwa: "Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki/membangun dengan model data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model dan logika."(2005:169)

Jogiyanto pengertian normalisasi (2005:403) "normalisasi adalah proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang."

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan normalisasi adalah salah satu cara memperbaiki model data rasional, yang secara umum lebih tepat dikoneksikan sesuai model data secara logika.

Berikut merupakan tahapan normalisasi menurut Al-Bahra (2005:169):

A. Bentuk tidak normal *(Unnormalized Form)*
   Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adaya sesuai dengan saat menginput.

B. Bentuk normal ke satu *(First Normal Form/1NF)*
   Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa group elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi diantara setiap baris pada suatu tabel dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang *atomatic.* (bersifat *automatic value*). Atom adalah zat terkecil yang masih

memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.

Syarat normal kesatu (1-NF) yaitu:

1. Setiap data dibentuk dalam flat file, data dibentuk dalam satu *record* demi satu *record* nilai dari *field* berupa "*automatic value*"
2. Tidak ada *set attribute* yang yang berulang atau bernilai ganda
3. Telah ditentukannya *primary key* untuk table /relasi tersebut
4. Tiap attribute hanya memiliki satu pengertian

C. Bentuk normal ke dua *(Second Normal Form/2NF)*

Bentuk normal kedua didasari atas konsep *full functional dependency* (ketergantungan fungsional sepenuhnya).

Syarat normal kedua (2-NF)

1. Bentuk data telah memenuhi criteria bentuk normal kesatu.
2. Atribut bukan kunci (*Non-Key)* harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya (*fully functiona dependency*) pada kunci utama/*primary key*.

D. Bentuk Normal Ketiga (*Trird Normal/3* NF)

Syarat normal ketiga:

1. bentuk data telah memenuhi data kedua
2. Atribut bukan kunci haruslah tidak memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya, seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap *primary key* direlasi itu saja.

E. *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF)

Boyce-Codd Normal Form (BCNF) didasari pada beberapa ketergantungan fungsional *(functional dependencies)* dalam suatu relasi yang melibatkan seluruh *candidate key* di dalam relasi tersebut.

2.3.1.6 Diagram Relasi Entitas

Menurut Al-Bahra definisi *Entity Relationship Diagram* (ERD) dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* adalah sebagai berikut: "*Entity Relationship Diagram* (ERD) adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak."(2005:142)

Menurut Fathansya definisi *Entity Relationship Diagram* (ERD) dalam bukunya yang berjudul *Basis Data* adalah sebagai berikut:

> Model *Entity Relationship* yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, dapat

digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD).(2004:79)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang tersimpan secara sistem atau teknik menggambar suatu skema database dimana setiap komponen yang terlibat dalam ERD memiliki atribut masing-masing yang mempresentasikan fakta dari dunia nyata dan sedang ditinjau.

A. Derajat Relationship *(Relationship Degree)*

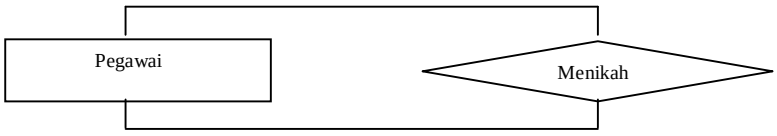
Menurut Al-Bahra definisi Derajat Relationsip dalam bukunya yang berjudul *Konsep Sistem Basis Data dan Implementasinya* menyatakan bahwa: "*Relationship Degree* adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu *relationship*."(2005:144)

Derajat *Relationship* yang sering digunakan dalam ERD sebagai berikut:

5. *Unary Relationship*

Menurut Lajamudin definisi *Unary Relationship* dalam bukunya adalah model *relationship* yang terjadi antara entity yang berasal dari *entity set* yang sama.

Contoh:



Gambar 2.3 Diagram *Relationship Unary* (2005:145)

6. *Binary Relationsip*

Menurut Lajamudin definisi *Binary Relationsip* dalam bukunya adalah model *relationship* antara *instance-instanse* dari suatu tipe entitas (dua *entity* yang berasal dari *entity entity* yang sama). *Relationship* ini paling umum digunakan dalam pembuatan model data.

Contoh :

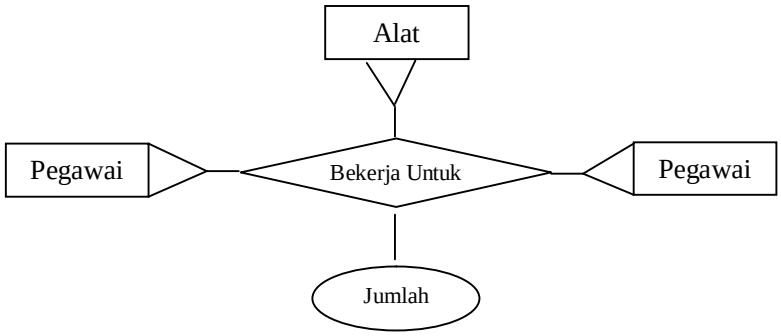


Gambar 2.4 Diagram *Relationship Binary* (2005:145)

3. *Ternary Relationship*

Lajamudin definisi *Binary Relationsip* dalam bukunya adalah *Ternary Relationship* antara *instance-intance* dari tiga tipe entitas secara serentak.

Contoh:



Gambar 2.5 Diagram *Ternary Relationship* (2005:146)

B. Kardinalitas Relasi

Menurut Al-Bahra definisi Kardinalitas relasi dalam buku yang berjudul *Konsep Sistem Basis Data dan Implementasi* adalah sebagai berikut: “Kardinalitas relasi menunjukan jumlah maksimum *tupel* yang dapat berelasi dengan entitas pada entitas yang lain.”(2005:147)

Terdapat 3 macam Kardinalitas relasi menurut Lajamudin yaitu sebagai berikut:

1. Relasi satu ke satu (*One to One*)

   Tingkat hubungan ini menunjukan hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama, dan hanyan mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya.

   Contoh



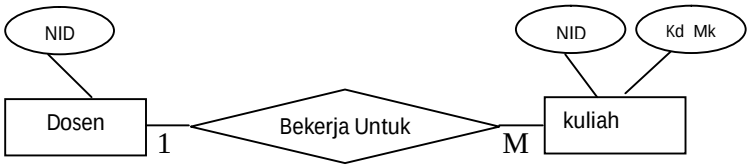
Gambar 2.6 *One to One* (2005:149)

2. Relasi satu ke Banyak (*One to Many* atau *Many to One*)

   Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu, tergantung dari mana hubungan arah tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang kedua. Sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang kedua

hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang pertama.

Contoh:

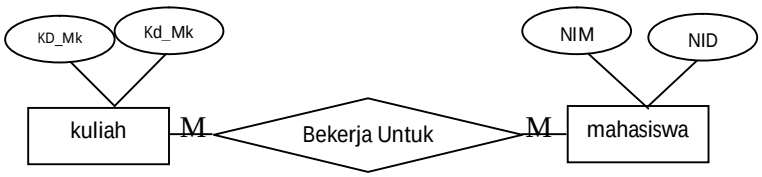


Gambar 2.7 *One to Many* (2005:150)

3. Relasi banyak ke banyak (*Many to Many*)

   Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya, dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi yang kedua.

   Contoh:



Gambar 2.8 *Many to Many* (2005:155)

2.4 Software

Definisi *software* menurut Azhar Susanto dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi,* menjelaskan bahwa : *software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada

komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. (2008:234)

Definisi *software* menurut Melwin Syafrizal Daulay dalam buku yang berjudul *Mengenal Hardware-Software dan Pengelolaan instalasi komputer* mendefinisikan *software* sebagai berikut "perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer". (2007:22)

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa *Software* adalah sebuah perangkat yang menghubungkan suatu komputer dengan pengguna atau bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang umumnya digunakan untuk mengkontrol perangkat keras.

2.4.1 *Software* Sistem Operasi

Definisi sistem operasi menurut Azhar Susanto dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi,* menjelaskan bahwa "sistem operasi memiliki fungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang pada suatu sistem komputer". (2008:235)

Definisi Sistem Operasi menurut Azhar Susanto adalah "*operating system software* (sistem operasi) berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komponen".(2013:235)

Berdasarakan definisi-definisi di atas Sistem Operasi adalah perangkat lunak (*software*) untuk mengendalikan hubungan atara komponen-komponen komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar sebagai masukan.

2.4.2 *Software Interpreter*

Definisi *software interpreter* menurut Azhar Susanto dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi,* menjelaskan bahwa "interpreter merupakan *software* yang berfungsi sebagai penterjemah bahasa yang di mengerti oleh manusia kedalam bahasa yang dimengerti oleh komputer (bahasa mesin) perintah per perintah". (2008:239)

Definisi *software* interpreter menurut Azhar Susanto adalah "*interpreter* merupakan *software* yang berfungsi penerjemah bahwa yang dimengerti oleh manusia bukan kedalam bahada yang dimengerti oleh komputer".(2013:239)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut *Software* Interpreter adalah suatu model penerjemahkan perintah dari *software* ke dalam perintah yang dimengerti oleh komputer.

2.4.3 *Software Compiler*

Definisi *software compiler* menurut Azhar Susanto dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa "*compiler* berfungsi untuk menterjemahkan bahasa yang di pahami manusia ke dalam bahwa yang di pahami oleh komputer secara langsung atau *file*". (2008:24)

Definsi *Software Compiler* menurut Azhar Susanto adalah "compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahwa yang dipahami oleh manusia kedalam bahasa yang dipahami oleh computer secara langsung satu file". (2013:241)

Berdasarkan definisi-definisi di atas *software compiler* adalah untuk menerjemahkan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer.

2.4.4 *Software* Aplikasi

Definisi *software* aplikasi menurut Azhar Susanto dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi,* menjelaskan bahwa "perangkat lunak aplikasi atau juga sering disebut sebagai „paket aplikasi‟ merupakan *software* jadi yang siap digunakan". (2008:242)

Definisi lain dari *software* aplikasi menurut Azhar Susanto adalah "perangkat lunak aplikasi atau sering juga disebut sebagai "paket aplikasi" merupakan software jadi yang siap untuk digunakan". (2013:174)

Berdasarkan definisi-definisi di atas *software* aplikasi adalah program yang dibuat untuk aplikasi tertentu dan untuk mempermudah pekerjaan terutama dalam pemrosesan data atau informasi yang diperlukan pemakai.

2.4.5 *Crystal Report*

Menurut Madcom dalam bukunya yang berjudul *Visual Basic 6.0 dengan Crystal Report* menjelaskan bahwa: "*Crystal Report* merupakan program khusus untuk membuat laporan yang terpisah dengan program *Microsoft Visual Basic 6.0*, tapi keduanya dapat dihubungkan (di link-an)." (2003:40)

Menurut Kusrini dan Andri Kuniyo dalam bukunya yang berjudul *Membangun Sistem Informasi Akuntansi* dengan *VB* dan *SQL Server* menjelaskan bahwa: *Crystal Report* merupakan program yang dapat digunakan untuk membuat, menganalisis dan menterjemahkan informasi yang terkandung dalam *database*/program kedalam berbagai jenis laporan yang sangat fleksibel. (2007:264)

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Crystal Report* merupakan sebuah program yang digunakan untuk membuat laporan dari suatu sistem menjadi informasi pada perusahaan.